



Analisis Perbandingan Konsep Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Sindi Ayu Pramudita

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Nia Lailatul Badriyah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Muhammad Dani Al-Aziz

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Vira Septia Dwi Putri

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: sindiayu183@gmail.com, nialailatul.5@gmail.com, danieliz1504@gmail.com, viraseptia45@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze and compare the concept of national income from the perspective of conventional economics and Islamic economics. National income is a key indicator in assessing a country's economic performance. In conventional economics, national income calculations focus on production output, expenditures, and income, without taking into account moral values or Islamic legal principles. In contrast, Islamic economics emphasizes halal sources of income, fair distribution of wealth, and the welfare of the ummah as primary goals. This research uses a qualitative approach through literature study. The analysis reveals fundamental differences between the two systems, particularly in terms of income sources, economic objectives, and distribution mechanisms. This study is expected to provide new insights for developing a more just and sustainable economic system.*

Keywords: *Conventional Economics, Islamic Economics, National Income,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi konvensional, penghitungan pendapatan nasional berfokus pada output produksi, pengeluaran, dan pendapatan masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek moral dan hukum syariah. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pada sumber pendapatan yang halal, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua pendekatan, baik dari segi sumber pendapatan, tujuan ekonomi, maupun mekanisme distribusinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi islam, ekonomi konvensional, Pendapatan nasional

PENDAHULUAN

Setiap negara tentu telah memiliki konsepsi sendiri mengenai arah dan tujuan perekonomiannya. Menetapkan corak atau sistem perekonomian, dan pilihan itu dianggap sejalan dengan kondisi negaranya. Diketahui bahwa semua sistem perekonomian yang ada itu bisa mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme, sistem fasisme, bahkan sistem

ekonomi sosialisme, juga komunisme. Diantara sistem perekonomian tersebut, terutama di beberapa negara Asia, Afrika dan diantara negara di Eropa dan Amerika mulai tertarik dan mencoba menerapkan, atau mengimplementasikan sistem ekonomi syariah.

Pada ekonomi makro bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan indikator untuk mengetahui prestasi perekonomian nasional. Pendapatan nasional diartikan sebagai pendapatan, dan pendapatan itu diterima dalam ukuran satu tahun dari seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara. Pertumbuhan nasional dikatakan sebagai prestasi perekonomian nasional, karena menyangkut proses dan perubahan situasi perekonomian yang berkesinambungan pada suatu negara dengan ukuran waktu tertentu.

Selain sistem ekonomi konvensional dikenal pula sistem ekonomi syariah, dan sejalan perkembangannya saat ini semakin, atau berhasil menjadi alternatif pasca memudarnya sistem ekonomi sosialis dan komunis, bahkan berangsur menggeser keperkasaan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi syariah yang didasari, atau mendasar/terikat pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum terkait praktik ekonominya. Apalagi Islam melalui sistem ekonominya turut membahas tentang pendapatan suatu negara sebagaimana pada ekonomi konvensional yang dikenal dengan pendapatan nasional.¹

Pendapatan nasional yang hingga kini masih dinilai sebagai pondasi utama politik ekonomi. Atas dasar itu maka pemerintah di suatu negara selalu berupaya keras melakukan peningkatan pendapatan nasional, dan itu didukung oleh segenap kebijakan yang terkait dengan perekonomian. Setiap aktivitas ekonomi erat hubungannya dengan pendapatan nasional, dan kini telah pula mengikutsertakan penerapan sistem ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia, dan juga dijadikan parameter dalam mendeskripsikan serta menilai pendapatan nasionalnya. Indonesia sebagai negara yang multikultural melalui pemerintahan sehubungan usaha pembangunan ekonomi seringkali dihadapkan ke upaya peningkatan pendapatan nasional. Oleh sebab itu artikel ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai konsep pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional dan konsep pendapatan nasional dalam perpektif islam.

¹ Novi Sumyardi, "Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Islam", dalam (<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>), diakses pada 30 April 2025

Berbeda dengan pendekatan konvensional, zakat dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mempercepat pembangunan daerah. Studi empiris menunjukkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Jawa Timur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan dana zakat dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Selain itu, zakat juga berperan dalam mendukung program pembangunan daerah dengan memberikan bantuan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik (penerima zakat).

KAJIAN TEORI

Definisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional secara umum dapat diartikan sebagai pendapatan/penghasilan yang diterima oleh seluruh warga masyarakat suatu negara sebagai balas jasa dari faktor produksi yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai total produksi yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional dapat memberikan informasi jumlah produk yang dihasilkan di dalam negeri (GDP/PDB) yang merupakan ukuran dasar keberhasilan ekonomi suatu negara.²

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Metode Output (*Product Method*)

Metode output menghitung nilai total output barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Semua barang akhir dan jasa harus dimasukkan tanpa memandang di mana ia dijual, kepada konsumen, pemerintah, luar negeri atau perusahaan dalam bentuk peralatan kapital. Untuk menghindari dua kali perhitungan (*double counting*) sehingga menghasilkan over estimasi, maka produk antara tidak dimasukkan. Atau cara lain ialah dengan menghitung nilai tambah bagi

² Nurul Huda, *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 39

tiap perusahaan untuk tingkat produksi yang berbeda, sehingga terhindar perhitungan ganda.³

2. Metode Pendapatan (*Income Method*)

Mengingat pendapatan nasional muncul dari produksi barang dan jasa oleh faktor produksi, cara lain untuk menghitung nilai total output ialah dengan cara menghitung semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi sebagai jasa, baik dalam bentuk pendapatan berupa upah, gaji, sewa, bunga, keuntungan, deviden. Metode ini dinamakan "*income method*". Pendapatan nasional secara keseluruhan belum tentu mencerminkan pendapatan bersih masyarakat yang dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa. Pendapatan bersih masyarakat (*disposable income*) merupakan pendapatan kotor yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban berupa pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya, seperti penerimaan transfer

3. Metode Pengeluaran (*Expenditure Method*)

Dengan menjumlahkan semua nilai uang yang dikeluarkan untuk barang akhir dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian akan sampai pada pengukuran *national expenditure*. Harus dicatat bahwa ini hanya akan sama dengan *national output* jika kita mengizinkan adanya perubahan stok (*inventories*) dan kemajuan pekerjaan. Ini biasanya termasuk dalam pengeluaran total karena merupakan bagian dari pengeluaran investasi perusahaan. Oleh karena itu, pengeluaran nasional merupakan penjumlahan dari konsumsi barang-barang dalam negeri, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan bersih dari perdagangan luar negeri.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel buku dan jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan membandingkan konsep pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sumber data yang diperoleh diambil dari karya-karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan.

³ Detri Karya, dan Syamri Syamsudin, *Makroekonomi: Pengantar untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.63

⁴ *Ibid.*, hlm. 64—67

Teknik ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu yang pertama tahap reduksi data, yakni data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Konvensional

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan pendapatan nasional riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) pada suatu negara. Saat pendapatan Nasional naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Akan tetapi, bagi sejumlah ekonom (ekonom muslim) konsep tersebut ditolak. Mereka mengatakan bahwa Pendapatan nasional per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran kesejahteraan ekonomi dalam konsep pendapatan nasional riil harus mampu menggambarkan kesejahteraan pada suatu negara secara riil.

Konsep Pendapatan Nasional riil dalam ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut. Pendapatan Nasional juga tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam pendapatan nasional. Di samping itu, seharusnya konsep pendapatan nasional harus lebih memberi tekanan/bobot terhadap produksi bahan kebutuhan pokok. Selama ini konsep pendapatan

nasional memberi nilai yang sama antara bahan kebutuhan pokok dengan komoditas tersier lain jika nilai nominalnya sama.⁵

Sumber-Sumber Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Konvensional

Sumber-sumber pendapatan suatu negara diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP)

Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh departemen produksi di dalam suatu negara dalam satu tahun⁶

$$\text{GDP} = \text{Pendapatan Masyarakat Domestik} + \text{Pendapatan Asing Domestik}$$

2. Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP)

Produk nasional bruto dapat diartikan sebagai nilai produk meliputi barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Misal penduduk Indonesia berjualan di Jepang, maka pendapatannya termasuk GNP.

$$\text{GNP} = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (Luar Negeri)} - \text{Pendapatan Asing}$$

3. Produk Nasional Neto (PNN) atau *Net National Product* (NNP)

Produk nasional neto dapat diartikan sebagai nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga Negara dalam waktu satu tahun setelah dikurangi penyusutan barang-barang modal.

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{penyusutan barang modal (depresiasi)}$$

4. Pendapatan Nasional Neto atau *Net National Income* (NNI)

Pendapatan nasional neto dapat diartikan sebagai pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.⁷

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$$

5. Pendapatan Perseorangan atau *Personal Income* (PI)

⁵Muhammad, *Makroekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), hlm. 95

⁶ Aqif Khilmia, "Pendapatan Negara antara Konvensional dan Islam", dalam (<https://journal.iaingorontalo.co.id/index.php/ab/article/download/2484/1251>) diakses pada 30 April 2025

⁷ *Ibid.*, hlm 6

Pendapatan perseorangan dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melaksanakan kegiatan apapun.

$$PI = NNI - (\text{Laba ditahan} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{asuransi}) + \text{Transfer Payment}$$

6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau *Disposable Income* (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan dapat diartikan sebagai pendapatan yang benar-benar siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi.⁸

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung (Pajak Penghasilan)}$$

Konsep Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam terdapat beberapa perbedaan dalam aktivitas ekonomi dengan ekonomi konvensional. Salah satunya adalah dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parameter *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup inderawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang yang diperoleh setelah kematian manusia, yaitu berada di surga. Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat yang abadi. Sebab, dunia adalah ladangnya akhirat.

Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multidimensi. *Falah* memiliki implikasi pada aspek mikro maupun makro atau dalam sektor riil dan moneter. Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya memperhitungkan kesejahteraan dunia semata. Maka dari itu, selain memasukkan unsur *falah*, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁹ Terdapat perbedaan siklus aliran pendapatan nasional dalam makro ekonomi konvensional dengan makro ekonomi Islam. Jika ditelisik lebih mendalam maka siklus aliran pendapatan nasional dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan berupa upah (*ljarah*) dan bagi hasil, memperoleh upah dari hasil tenaga kerja dan memperoleh bagi hasil dari investasi. Investasi dapat berupa akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*

⁸ *Ibid.*, hlm 6

⁹ Muhammad, *Makroekonomi Islam...*, hlm. 95

dengan pihak perusahaan. Adapun pengeluaran sektor rumah tangga yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah konsumsi, dimana konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional dan pengeluaran yang lainnya seperti pajak, zakat, infaq, dan shadaqah yang di mana di dalam ekonomi konvensional sama sekali tidak dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan.¹⁰

2. Adapun sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi yang merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga untuk konsumsi menjadi pendapatan pada sektor perusahaan, pendapatan yang lainnya berupa bagi hasil dengan pihak investor dan pendapatan dari hasil ekspor impor barang dan jasa. Adapun pengeluarannya adalah untuk membeli faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga, dan membayar zakat, infak, shadaqah, dan pajak. Pendapatan nasional harus mampu mengukur produksi di sektor moneter dan sektor riil. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islami. Pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.
3. Sektor Sosial, yaitu sektor perekonomian yang memberikan pemasukan dalam bentuk sumbangan wajib maupun sukarela keagamaan yang dilakukan oleh rumah tangga maupun perusahaan kepada Baitul Mal (pemerintah). Sumbangan wajib keagamaan seperti zakat. Sumbangan sukarela keagamaan seperti: infaq, sedekah, wakaf, hadiah, dan yang semacam dengannya. Sumber-sumber penerimaan ini dapat dimanfaatkan atau dialokasikan sesuai dengan aturan bakunya. Seperti sumber dana zakat hanya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang tergolong delapan asnaf. Sementara sumber dana infaq, sadaqah, wakaf, dan hibah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan baik yang berkaitan dengan *software* maupun *hardware*.¹¹

Sumber Pendapatan Nasional dalam Islam

Adapun sumber pendapatan negara terutama dalam ekonomi Islam, lebih banyak di tinjau dari perspektif sejarah. Hal ini dilihat pada beberapa pokok pembahasan yang banyak berlaku di masa awal-awal berkembangnya Islam dan masa-masa pemerintahan *khulafah al-Rasyidin*. Pendapatan utama kerajaan (primer) dalam sistem ekonomi Islam, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu (1) *Ghanimah*, (2) *Shadaqah*, dan (3)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 96

¹¹ *Ibid.*, hlm. 96—98

Fay'i. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan kerajaan dapat dibagi dua kumpulan saja, yaitu: (1) pendapatan tidak resmi kerajaan dan (2) pendapatan resmi kerajaan.

Pendapatan tidak resmi kerajaan, yang terdiri dari ghanimah dan shadaqah. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena digunakan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun kerajaan bertanggungjawab dalam pengumpulannya (Amil), namun kerajaan wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan sedekah dan ghanimah). Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh), kerajaan berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, pengangkutan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.¹² Untuk lebih jelasnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam perspektif islam antara lain :

a. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan peperangan.

b. Sedekah

Sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu sepersepuluh ('ushr) atau separuh dari sepersepuluh (nisful-'ushr) yang diambil dari panen biji-bijian atau buah-buahan; juga zakat binatang ternak, seperti onta, domba, sapi; zakat atas barang perniagaan dan zakat atas dua logam mulia, yaitu emas dan perak.¹³

c. Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada hadnya, infak tidak mengenal had (nisab). Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpendapatan tinggi maupun rendah, apakah

¹² *Ibid.*, hlm 99—101

¹³ *Ibid.*, hlm 102—103

ia dalam kondisi lapang mahupun sempit. Jika zakat harus diagihkan kepada yang berhak (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya.

d. Zakat

Zakat secara umumnya berarti pertambahan, berasaskan pengertian umum ia kemudiannya digunakan bagi banyak pengertian seperti cerdas, subur, jernih, berkat, bersih dan lain-lain. Sebagai satu istilah dalam pengajian hukum Islam atau "*Fiqh*", zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu bagi faedah golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan. Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintah Islam atas nasib orang miskin. Zakat merupakan hak orang miskin yang ada pada orang kaya. Menurut Yusuf Qardhawi, pengurusan zakat yang dilakukan oleh kerajaan ini sangat utama karena beberapa pertimbangan¹⁴

e. 'Ushr

Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh ('ushr) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan diberikan/dibayarkan sebagaimana pengeluaran zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang non Muslim yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang perniagaan. 'Ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama. Ushr merupakan suatu cukai atas hasil pertanian.

f. Fay'i

Fay'i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay'i menunjukkan seluruh harta yang didapati dari musuh tanpa peperangan. Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan masyarakat. Harta fay'i ini oleh Al-ghazali, dinamakan dengan amwal al-mashalih, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.¹⁵

g. Jizyah

Istilah jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti perampasan (pembayaran ganti rugi). Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban

¹⁴ *Ibid.*, hlm 104

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 105—106

yang diambil dari penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

Dengan perkataan lain, jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan harta dan kebebasan untuk menjalankan aktivitas agama mereka masing-masing. Istilah jizyah tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh sebab itu, jizyah tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam.

h. Kharaj

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah cukai atas tanah atau hasil tanah, di mana para penguasa wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Kharaj (cukai) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Ada perbedaan antara kata al-kharju dengan al-kharaj. Al-Kharju (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan al-kharaj (cukai) diterapkan kepada tanah. Kharaj adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin dari orang-orang non-Muslim yang tergolong ke dalam kumpulan pendapatan negara fay'i yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.

i. Cukai atas Pertambangan dan Harta Karun

Jika satu tambang yang padat dan dapat dilebur, yang di dalamnya mengandung emas, perak, besi dan sebagainya, atau harta karun yang didapati dalam wilayah tanah kaum Muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial.

j. Wakaf

Memberikan bantuan kepada seseorang untuk kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan bisa dalam bentuk materi kebendaan (tanah, rumah, barangan) ataupun aset keuangan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm 107-110

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan indikator penting yang mengukur kinerja ekonomi suatu negara, baik dari segi output produksi maupun distribusi pendapatan. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional dihitung berdasarkan output, pendapatan, dan pengeluaran tanpa mempertimbangkan nilai moral atau prinsip hukum syariah, sering kali menganggap bahwa peningkatan pendapatan nasional sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pada sumber pendapatan yang halal, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan umat, dengan konsep *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) sebagai parameter utama dalam mengukur pendapatan nasional.

Terdapat tiga metode utama dalam menghitung pendapatan nasional: metode output, metode pendapatan, dan metode pengeluaran, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sumber pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional meliputi PDB, PNB, dan NNI, sedangkan dalam ekonomi Islam, sumber pendapatan juga mencakup zakat, infak, dan wakaf yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua sistem dalam hal tujuan ekonomi, mekanisme distribusi, dan pengukuran kesejahteraan, di mana ekonomi Islam mengintegrasikan aspek sosial dan spiritual..

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Tania. 2024. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BANJARESE (online)*, 2 (09). (https://www.researchgate.net/publication/383759846_Pendapatan_Nasional_Dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam) diakses pada 30 April 2025.
- Aziz, Abdul. 2023. *Ekonomi Makro Islam: Teori & Studi Kasus*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Balke, Nathan S. 2021. The Estimation of Prewar Gross National Product: Methodology and Evidence. *JSTOR (online)*, 97 (01). (<https://www.jstor.org/stable/1831055>), diakses pada 30 April 2025.
- Ekawarna, & Muslim, Fachruddiansyah. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada.

- Hasan, Asyari., dkk. 2023. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah (online)*, 4 (2). (<https://repository.uinjkt.ac.id/space/handle/123456789/73696>, diakses pada 30 April 2025).
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro Edisi Pertama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Huda, Nurul. 2014. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, A. Adiwarmam. 2020. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press
- Karya, Detri., Syamsudin, Syamri 2016. *Makroekonomi: Pengantar untuk Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khilmia, Aqif. 2022. Pendapatan Negara antara Konvensional dan Islam. *Al Buhuts (online)*, 18 (01). (<https://journal.iaingorontalo.co.id/index.php/ab/article/download/2484/1251>), diakses pada 30 April 2025.
- Muhammad. 2020. *Makroekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UPP Stim Ykpn.
- Murni, Asfia. 2016. *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prawoto, Nano. 2019. *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumyardi, Novi. 2024. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam. *Journal of Social and Economics Reserach (online)*, 06 (01). (<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>), diakses pada 30 April 2025.
- Syahbudi, Muhammad. 2018. *Ekonomi Makro Perspektif Islam*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan.